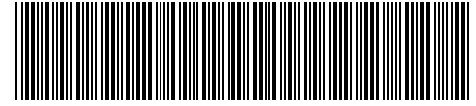




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099067/2025**



DS:2474-3947-0247-1303

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 3. Provinsi : (02) JAWA BARAT
 4. Kode>Nama Satker : (099067) PENGADILAN TINGGI BANDUNG
- Sebesar : Rp. 731.615.000 (TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang
Rp. 731.615.000
Rp. 731.615.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	731.615.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDUNG II (095) Rp. 731.615.000

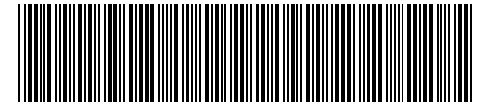
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099067/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2474-3947-0247-1303

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (099067) PENGADILAN TINGGI BANDUNG

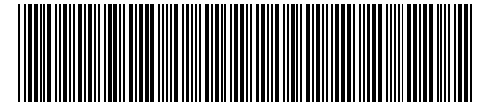
Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			731.615.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			731.615.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum			
		2. 01	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu			
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum			
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara			
		5. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	25,00	kegiatan	273.360.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	24,00	kegiatan	248.360.000
		02 AEA.003	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1,00	kegiatan	25.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	77,00	orang	214.522.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	77,00	orang	214.522.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	470,00	Perkara, Berkas Perkara	243.733.000
Rincian Output	:	01 BCA.U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	416,00	Perkara	208.596.000
		02 BCA.U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	54,00	Perkara	35.137.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099067/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2474-3947-0247-1303

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (099067) PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Kewenangan : (KD)

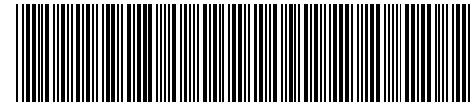
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	-	731.615	-	-	-	731.615		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	731.615	-	-	-	731.615		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	731.615	-	-	-	731.615		
1049.AEA	Koordinasi (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	-	273.360	-	-	-	273.360	02 . 51	
01	RM	-	273.360	-	-	-	273.360	095@	
1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	-	214.522	-	-	-	214.522	02 . 51	
01	RM	-	214.522	-	-	-	214.522	095@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	-	243.733	-	-	-	243.733	02 . 51	
01	RM	-	243.733	-	-	-	243.733	095@	
JUMLAH		-	731.615	-	-	-	731.615		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099067/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2474-3947-0247-1303

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (099067) PENGADILAN TINGGI BANDUNG

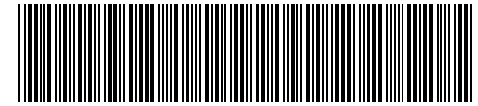
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	37.743	8.226	6.828	39.238	5.243	13.523	528.520	8.138	8.138	44.794	10.658	20.570	731.615
		BELANJA BARANG	37.743	8.226	6.828	39.238	5.243	13.523	528.520	8.138	8.138	44.794	10.658	20.570	731.615
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	37.743	8.226	6.828	39.238	5.243	13.523	528.520	8.138	8.138	44.794	10.658	20.570	731.615
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	37.743	8.226	6.828	39.238	5.243	13.523	528.520	8.138	8.138	44.794	10.658	20.570	731.615
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.588	18.990
		- PNBP (425239)	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	1.588	18.990

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099067/2025
IV A. B L O K I R**



DS:2474-3947-0247-1303

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [099067] PENGADILAN TINGGI BANDUNG

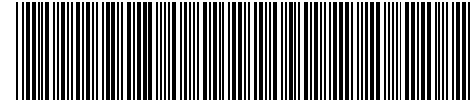
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	230.731
	52 Belanja Barang	Rp.	230.731
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
1049.AEA	Koordinasi		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	117.430
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	6.750
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	104.661
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.890
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099067/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:2474-3947-0247-1303

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [099067] PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002